

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu yang muncul pada akhir abad ke-19 dapat dikatakan sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengalami proses dinamisasi yang tergolong cepat (Hadiwinata, 2007). HI dimasa kini sudah tidak melulu berkutat pada pencarian *power*, kepentingan nasional, ataupun cerita-cerita *grand narratives* yang mengandalkan betapa pentingnya tampuk kepemimpinan para raja atau jendral (Wirasenjaya, 2012). Bahasan-bahasan studi HI sudah keluar jauh dan melampaui isu-isu tersebut. Mulai dari 1983 studi HI juga sudah berbicara akan emansipasi, soal bagaimana membebaskan keterkungkungan manusia, hingga tentang bagaimana mengembangkan potensi yang ada dari tiap-tiap maunsia (HI UGM, 2019).

HI yang bicara soal pembebasan keterkungkungan pada manusia ini lebih lanjut juga menyebarkan semangat akan penyebarluasan gagasan baik itu ide atau norma untuk mengubah keadaan tersebut, agar dunia bisa memiliki pandangan utuh dan sama akan suatu masalah. Ide atau norma yang dimaksud adalah norma kosmopolitan, suatu ide yang membahas bahwa setiap individu didunia ini tidak boleh dibatasi dan dibedakan hanya karena perbedaan-perbedaan yang ada, karena pada dasarnya setiap individu dimuka bumi ini adalah sederejat dan sebagai bagian dari umat manusia (Maksum, 2014). Pembahasan penyebaran norma kosmopolit inilah yang menjadi awal bagaimana masalah yang dibicarakan dapat menemui pandangan yang sama dari *global civil society*. Seperti yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini yaitu soal keseragaman pandangan masyarakat dunia terhadap isu feminisme. Isu yang berkutat pada pembebasan perempuan dari ketidakadilan konstruksi dimasyarakat.

Bahasan feminisme dalam HI berhasil mengubah citra studi ini dari masa-masa sebelumnya. Dimana HI sempat

didominasi oleh pandangan kaum realis yang menganggap pentingnya nilai-nilai maskulinis seperti contoh pada pentingnya keamanan negara (Robert Jackson, 2013). Menurut Nur Azizah dalam bukunya mengatakan bahwa feminisme adalah sebuah pemikiran yang mengakui adanya subordinasi yang dialami oleh perempuan, dari perilaku ini yang kemudian memunculkan suatu usaha atau jalan keluar untuk mengakhirinya (Azizah, 2017). Ani Soetjipto dalam bukunya juga menjelaskan bahwa feminisme adalah suatu gerakan politik dengan pokok bahasan utamanya adalah hak-hak perempuan dan emansipasi gender, menurutnya pula pusat dari teori ini adalah pada gender sebagai pusat dari keseluruhan analisis (Soetjipto, 2013). Melalui pandangan dari kedua penulis tersebut dengan ini dapat ditarik bahwa konstruksi gender pada perempuan yang timpang menjadi penting, karena keadaan ini terjadi diberbagai kebudayaan dunia. Dimana perempuan sering mendapatkan posisi yang tidak diuntungkan.

Posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan yang tidak menguntungkan tersebut salah satunya dapat dilihat dari adanya doktrin soal perempuan diberbagai macam kebudayaan dunia, misalnya doktrin perempuan pada masa pendudukan Nazi di Jerman yaitu *Kinder, Kirche, Kuece* atau yang dapat diartikan dalam bahasa bahwa peran perempuan yaitu mengurus anak, gereja, dan dapur (Maria Ulfa, 2013). Hal serupa juga dapat ditemui di Indonesia dengan doktrin dapur, kasur, dan sumur (Hermawati, 2007). Demikian juga di Iran seperti dengan pernyataan Shirin Ebadi bahwa menjadi perempuan Iran adalah posisi yang sulit karena memang segala hal dibuat diskriminatif, bahkan nilai kesaksian seorang perempuan dianggap setengah dari kesaksian seorang laki-laki (Shilawati, 2013).

Ujaran atau doktrin-doktrin tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa perempuan sampai saat ini pun masih dianggap sebagai liyan bahkan *second sex* dalam kehidupan sosial. Tak bisa dipungkiri hal-hal tersebut membuat feminisme sebagai sebuah ide baru dengan cepat dapat tersebar. Mengenai adanya

kesamaan rasa yang dialami oleh perempuan karena perbedaan konstruksi sosial. Dengan ini feminisme dapat menyebar ke berbagai macam negara yang menganut berbagai paham ideologis, pun termasuk Iran sebagai negara yang dilabeli konservatif.

Jumhuri ye Islami ye Iran atau Republik Islam Iran adalah salah satu negara yang terletak dikawasan Timur Tengah. Negara dengan julukan negeri para *mullah* atau ulama. Disebut demikian karena memang nyatanya ulama memegang peranan penting dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Kekuatan ulama di Iran dapat tercipta karena dijadikannya sistem *Velayat el- Faqeh* sebagai landasan ideologis dalam bersosial dan bernegara. Sistem ini adalah sistem yang menekankan kepemimpinan dibawah tangan para ulama, dianggap demikian karena sistem ini adalah sistem yang lahir dari sintesa ajaran Syiah Imam Kedua Belas, ajaran yang menganggap bentuk keimamahan adalah bentuk pemerintahan penerus kenabian (Usman, 2017). Dari sini kehadiran para ulama sama dengan kehadiran wakil Tuhan, maka dari itu segala sesuatu yang datang dari ulama seolah menjadi mutlak. Akibatnya ulama dapat berperan diberbagai macam bidang.

Pemerintahan para ulama tapi nyatanya tidak menjamin akan terpenuhinya hak dan keadilan pada rakyat. Ulama-ulama yang ada justru ulama yang tidak terbuka dengan pembaharuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran ulama yang justru melakukan tafsir sepihak dari teks-teks keagamaan, termasuk mengenai kehadiran dan peran perempuan (Shilawati, 2013). Dari sini awal ketimpang soal perempuan dan budaya patriarki di masyarakat tumbuh dan terbentuk. Kemudian diperkuat pula dengan posisi ulama sebagai aktor perumus kebijakan dan penentu lahirnya kebijakan, dimana memang pada nyatanya ulama laki-laki sangat mendominasi proses tersebut (Cipto, 2004). Kebiasaan akan produk kebijakan pun dimulai dari sini, bagaimana suatu kebijakan bisa memiliki keadilan jika perumusannya saja tidak

mewakili suara-suara rakyat. Dan ini makin diperkuat dengan banyaknya kebijakan yang koersif, intimidatif, dan diskriminatif pada perempuan. Kebijakan yang ada justru selalu menguntungkan laki-laki. Diantaranya seperti segregasi ditempat publik berdasar jenis kelamin, kontrol seksualitas seperti pada legalisasi praktik nikah mut'ah, kemudian soal kewajiban berhijab bagi seluruh perempuan Iran apapun itu kepercayaannya, lalu pada hak asuh anak, perceraian, hingga negara yang mengizinkan praktik pernikahan anak (Bakhshizadeh, 2018) (Justice for Iran, 2014) (Shilawati, 2013). Dari sini makin terlihat bahwa adanya ketimpangan gender di Iran juga terjadi karena negara. Septi Shilawati mengatakan dalam bukunya mengenai ketidaksetaraan perempuan di Iran justru dilegalisi oleh negara dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diskriminatif (Shilawati, 2013).

Akibat pembedan-pembedaan tersebut, tak heran jika posisi Iran selalu disudutkan terkait keadaan hak asasi manusia. Iran sering dilabeli sebagai negara pelanggar hak-hak fundamental. Menurut laporan yang disuguhkan oleh *United Nations High Commissioner for Human Rights 2018* menjelaskan dan menuntut pada Iran “untuk segera merubah dan menghapus hukum diskriminatif pada perempuan seperti pada bab pernikahan perceraian, warisan, hak asuh, hak kepemilikan paspor dan hak kewarganegaraan, serta segera meratifikasi Konvensi CEDAW untuk dapat digunakan sebagai instrumen hukum dalam menangani segala jenis pembedaan yang ada. Posisi Iran sangat disoroti komisi tinggi hak asasi manusia ini, terlebih soal adanya praktik pernikahan anak yang masih tinggi. Tidak hanya itu perilaku rezim yang diskriminatif terhadap perempuan yang tidak mengikuti syariat dan kebebasan perempuan dalam mengutarakan hak-haknya seperti pada perempuan pendukung kampanye online *My Stealthy Freedom* juga dipertanyakan, pasalnya banyak mereka yang mendukung gerakan pembebasan ini dicerna terus menerus oleh rezim, mereka bahkan sampai pada

tingkatan untuk menandatangani deklarasi yang berisi untuk tidak mengikuti gerakan pembebasan tersebut dan akan patuh terhadap kewajiban berhijab dimuka umum” (United Nations High Commissioner for Human Rights, 2018).

Amnesty Internasional sebagai salah satu INGO yang fokus dalam isu hak asasi manusia juga menyatakan demikian. Menyatakan bahwa keterkungkungan yang diberitakan media-media mengenai Iran bukanlah suatu cerita fiksi, ini nyata adanya. Negara menjadi sangat ketat, abusif, dan diskriminatif. Seperti pada kasus hijab dan gaya berpakaian, dengan ini tubuh sampai menjadi urusan negara. Dan ini tegakan dengan adanya polisi moral yang senantiasa mengawasi gaya berbusana masyarakat. Polisi moral akan menangkap mereka yang tidak menggunakan hijab sesuai syariat, hingga mereka yang menggunakan *make-up* berlebih. Tidak hanya itu perilaku polisi moral juga terkenal tidak manusiawi, sudah tidak terhitung lagi bentuk-bentuk kekerasan seperti penamparan, pemukulan, hingga hukuman penjara (Amnesty International, 2019).

Pencarian identitas di negeri yang merupakan replika dari aliran teologis Syiah Imam Dua Belas ini sampai sekarang masih memiliki pergulatan yang menarik. Pertautan antara modernitas dengan nilai-nilai demokrasi yang dibawanya dan nilai-nilai Syiah masih bergulir hingga saat ini. Jika sebelumnya Khomeini dengan pesona kharismaniknya dapat memesona masyarakat hingga kemudian merumuskan syariat Islam dan doktrin anti-Baratnya. Maka hal-hal tersebut pun bukan suatu yang absolut, dinamisasi terjadi dalam tubuh Iran. Seperti pada kasus bagaimana hubungan Barat dengan Iran hingga tumbuhnya perkembangan pemikiran di Iran, terkhususnya soal pemikiran-pemikiran feminis yang sangat dipengaruhi oleh konstelasi ideologi politik yang ada (Kamaluddin, 2011).

Perubahan konstelasi politik yang mempengaruhi perkembangan gerakan kesetaraan gender dapat dilihat salah

satunya dari kepemimpinan tiap presiden. Diawali dari sosok Khatami yang dikenal sebagai ulama yang moderat, sang pembuka dan penaruh perhatian terhadap pentingnya pengakuan dan hak bagi perempuan (Cipto, 2004). Dimana dalam pemerintahannya melahirkan sederet kebijakan yang mengarah pada demokratisasi Iran. Kemudian berubah total seiring naiknya Ahmadinejad yang dikenal sebagai loyalis revolusi yang sikap dan kebijakannya yang restriktif termasuk pada kelompok perempuan. Hingga munculnya hijab sebagai diskursus global yang digelorakan gerakan *My Stealthy Freedom* yang masih aktif hingga saat ini dibawah kepemimpinan Rouhani.

Suatu hal yang menarik untuk dikaji mengenai bagaimana kedudukan dan peran perempuan di Iran yang sering dibenturkan oleh konstruk syariah, dimana konstruk ini dimulai dari ulama yang kemudian ditegakkan oleh negara dan dilanggengkan oleh masyarakat. Namun, nampaknya konstruk Islamis dan anti-Barat yang dibangun oleh rezim terdahulu tidak selamanya berhasil. Pergeseran-pergeseran konstelasi politik yang diikuti oleh adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender menjadi menarik untuk diteliti dan dibahas.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan, maka kemudian penulis akan merumuskan pertanyaan ***“Bagaimana Pengaruh Feminisme Barat terhadap Gerakan Kesetaraan Gender di Iran Dari Kepemimpinan Khatami hingga Rouhani?”***

C. Kerangka Berpikir

Peneliti memperkuat kedudukan karya tulis ini melalui suatu analisis konseptual dengan meminjam suatu teori. Adanya penggunaan teori dalam karya tulis sangatlah penting karena digunakan sebagai sebuah kaca mata dalam memandang suatu kasus atau fenomena.

- *Teori Gender Mainstreaming*

Gender mainstreaming atau yang dalam bahasa disebut dengan pengarusutamaan gender adalah suatu istilah yang menjelaskan mengenai bagaimana peran penting integrasi gender dalam pembangunan. Istilah ini mengudara setelah diselenggarakannya *Beijing Platform for Action* pada 1995, suatu pertemuan yang menghasilkan bahasan soal pentingnya peran dan partisipasi perempuan, mengingat penghargaan terhadap keberadaan perempuan juga merupakan bagian dari penghargaan terhadap hak asasi manusia (Vijaya, 2014) (Brenner, 2009).

Pengarusutamaan gender atau yang selanjutnya disingkat PUG sering didefinisikan sebagai suatu langkah agar bagaimana gender bisa menjadi bahasan yang umum dan diintegrasikan dengan suatu pembangunan. Menurut *United Nations Development Programme* sendiri definisi PUG adalah sebagai berikut

Taking account of gender equality concerns in all policies, programmes, administrative and financial activities, and in organizational procedures, it contributes to a profound organizational transformation (Vijaya, 2014).

Dimana dapat diperjelas bahwa PUG menekankan bagaimana pentingnya kesetaraan gender disemua segi kehidupan, baik itu dalam hal kebijakan, keberlangsungan program, kegiatan adminsitratif dan finansial, hingga prosedural untuk mencapai suatu transformasi atau perubahan.

Lebih lanjut PUG adalah salah satu aspek kunci dalam bahasan *Gender and Development*, suatu pendekatan yang menyatakan bahwa kesuksesan pembangunan tidak hanya soal bagaimana struktur ekonomi atau politik tapi juga soal bagaimana kualitas individu yang ada yang terlihat dari adanya integrasi gender didalamnya (Brenner, 2009). Berbicara soal PUG pada kenyataannya bukan berbicara mengenai hasil, PUG lebih menjelaskan suatu proses, suatu strategi, ataupun langkah untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam pembangunan. Meskipun demikian namun PUG juga memiliki tujuan pada terjadinya transformasi dari ketidakadilan politik dan struktur institusional menjadi suatu keadilan yang benar-benar nyata (Vijaya, 2014).

PUG pada umumnya memang sangat identik pada negara, karena memang negara adalah aktor yang memiliki power dalam perumusan kebijakan dan pengimplementasiannya, termasuk soal kebijakan peningkatan peran aktif perempuan diberbagai bidang. Tapi seiring dengan berkembangnya fenomena-fenomena dalam HI, peningkatan aktivisme jaringan transnasional politik juga dapat membuat aktor-aktor selain negara juga dapat membawa pengaruh eksternal dan mempengaruhi isu domestik yang berakibat pada adanya transformasi disuatu negara atau perubahan isu dari domestik yang dapat membentuk dan mempengaruhi kembali dinamika dalam HI (True & Minitrom, 2001). Berdasar ini dapat dilihat bahwa PUG tidak selamanya berpusat pada kehadiran negara semata, PUG juga bisa hadir karena adanya tekanan dari pihak-pihak selain negara.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas bahwa rencana pengarusutamaan gender di Republik Islam Iran mulai terbuka sejak naiknya sang reformis Khatami menjadi Presiden pada 1997. Khatami dapat

dianggap peneliti sebagai keran pembuka gerakan kesetaraan gender di Iran yang mempengaruhi gerakan-gerakan kesetaraan dimasa-masa sesudahnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender yang berkembang setelahnya yaitu pada era Ahmadinejad hingga Hassan Rouhani seperti pada *One Million Signature*, *Green Movement*, hingga *My Stealthy Freedom*. Dimana gerakan-gerakan ini berfokus agar bagaimana bahasan gender bisa menjadi suatu yang umum, suatu yang bisa diterima masyarakat. Terlebih agar perempuan juga bisa mendapatkan porsi yang setara dengan laki-laki. Tak hanya itu gerakan-gerakan ini juga mengarah pada tuntutan demokratisasi bagi rezim.

D. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa pengaruh feminisme Barat pada gerakan kesetaraan gender di Republik Islam Iran dapat dilihat dari:

1. Adanya wacana kesetaraan gender yang ingin diwujudkan
2. Meningkatnya aktivisme gerakan kesetaraan gender dalam melawan rezim konservatif

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan pemikiran Feminisme dalam teori *Gender Mainstreaming*
2. Penelitian ini menjelaskan isu Feminisme yang menjadi salah satu bahasan kontemporer dalam studi Hubungan Internasional
3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Feminisme Barat pada gerakan-gerakan kesetaraan gender di Iran.

F. Metode Penelitian

Penelitian sosial adalah suatu proses untuk menemukan dan menghasilkan pengetahuan baru tentang “dunia sosial” yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (Susanti, 2019). Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dari penelitian sosial adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam riset ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan sosial dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam tipe ini pula sekaligus mengakui akan adanya kekurangan yaitu penjelasan yang tidak terinci (Susanti, 2019).

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti selama menempuh riset ini didapat dari data sekunder, suatu model pencarian data yang menekankan pencarian informasi dengan bersumber pada studi pustaka yaitu menggunakan buku, laporan, jurnal, berita, dan website (Jatmika, Skripsi Metodologi dan Romantikanya, 2016).

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada upaya-upaya yang dilakukan kelompok-kelompok pro-perempuan untuk membebaskan dan menuntut hak serta kewajiban yang dimilikinya, dalam penelitian ini kelompok-kelompok tersebut disederhanakan penamaannya dengan gerakan kesetaraan gender. Gerakan-gerakan yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Upaya proposal enandatangan Konvensi CEDAW pada era kepemimpinan Khatami tahun 1997-2005

2. Kampanye penghapusan hukum diskriminatif “*One Million Signatures*” pada era kepemimpinan Ahmadinejad tahun 2006
3. Demonstrasi *Green Movement* pada era kepemimpinan Ahmadinejad tahun 2009
4. Kampanye kebebasan hijab “*My Stealthy Freedom*” pada era Hassan Rouhani 2014 yang masih berjalan hingga sampai saat ini.

Berdasar gerakan-gerakan yang telah dikemukakan tersebut maka peneliti mengambil lingkup waktu mulai dari tahun 1997-2018. Pasalnya pada masa tersebut gerakan kesetaraan gender mengalami signifikansi besar dalam tuntutan dan peningkatan aktivitas gerakan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, argumen penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, membahas mengenai dominasi ulama dan kedudukan perempuan di Iran. Diawali dari hubungan aliran teologis Syiah dan Iran, dominasi kelompok ulama, adanya konstruk budaya patriarkal, lahirnya undang-undang atau kebijakan yang mendiskreditkan kaum perempuan, hingga rekam jejak feminisme Barat di Iran.

Bab III, membahas implikasi dari teori yang digunakan yaitu *Gender Mainstreaming*. Dimana akan dijelaskan bagaimana pengaruh dari feminisme Barat yang menjadi inspirasi tumbuhnya gerakan pembahasan perempuan di Iran, ditiap kepemimpinan presiden mulai dari naiknya Khatami, Ahmadinejad, hingga Rouhani. Dimana gerakan-gerakan kesetaraan gender tersebut berusaha mengupayakan untuk membuat bahasan gender menjadi sesuatu yang diarusutamakan.

Bab IV, berisi inti sari dari keseluruhan bab yang ada. Penulis akan menjelaskan inti sari dari pemaparan bab-bab sebelumnya dan sekaligus menjadi akhir dari penelitian ini.